LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

S.D. TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Ungkapan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun 2021 dapat tersusun. Sebagai salah satu unit koordinasi yang berada di lingkup Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berkewajiban menyusun Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 13, Bab IV dalam Peraturan MENPAN-RB No.29 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri bertujuan untuk :

a. Sarana bagi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban kinerja;

b. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal penguatan politik luar negeri Indonesia di dunia Internasional.

Suksesnya program kegiatan yang telah terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan rencana menjadi tolak ukur keberhasilan untuk kegiatan di masa yang akan datang, namun demikian hambatan dan kendala selama S.d. Triwulan II Tahun 2021 ini akan menjadi bahan evaluasi pada perbaikan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar

Negeri. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan evaluasi kinerja guna penyempurnaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Jakarta, Juli 2021

Plt. Deputi Bidang
Koordinasi Politik Luar Negeri,

DR. PRIBADI SUTIONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI **4**

RINGKASAN EKSEKUTIF .....Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN .....Error! Bookmark not defined.

- DASAR HUKUM.....**Error! Bookmark not defined.**
- TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI .....**Error! Bookmark not defined.**
- STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI .....**Error! Bookmark not defined.**
- ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....**Error! Bookmark not defined.**
- PERMASALAHAN UTAMA .....**Error! Bookmark not defined.**
- SUMBER DAYA ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA**Error! Bookmark not defined.**

BAB II PERJANJIAN KINERJA .....Error! Bookmark not defined.

A. RENCANA STRATEGIS .....**Error! Bookmark not defined.**

1. Visi, Misi dan Tujuan.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Strategis Kebijakan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. PERJANJIAN KINERJA.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....Error! Bookmark not defined.

A. Pengukuran Capaian Kinerja S.d. Triwulan II Tahun 2021**Error! Bookmark not defined.**

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021**Error! Bookmark not defined.**

C. Efisiensi .....**Error! Bookmark not defined.**

D. Realisasi Anggaran.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Amerika, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional dan Sekretaris Deputi.

Politik Luar Negeri merupakan arah kebijakan atau strategi suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk kepentingan nasional negara dalam lingkup dunia internasional. Untuk menciptakan hubungan internasional tersebut diperlukan sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas diplomasi dan kerjasama luar negeri Indonesia serta terselenggaranya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja.

Capaian Kinerja S.d. Triwulan II Tahun 2021 dapat terlihat dalam Tabel Capaian sebagaimana berikut :

Tabel 1 :
Tabel Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
S.d. Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target 2021**	**Realisasi S.d. Triwulan II Tahun 2021**	**% Realisasi 2021**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(4)**
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	90%	n.a	n.a
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	90%	100%	114%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	90%	66,67%	74%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	a. Nilai SAKIP	BB	n.a	n.a
	b. Nilai PMPRB	19	n.a	n.a
	c. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	n.a	n.a
	d. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75	n.a	n.a

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun 2021 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun 2021. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Capaian Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam.

TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tersebut, tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Asia dan Pasifik;

4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Afrika;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Timur Tengah;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Amerika;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Eropa;
8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ASEAN;
9. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Multilateral;
10. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Politik Luar Negeri;
11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidkoor Pollugri;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidkoor Pollugri melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Hukum dan HAM;
5. Kementerian Kominfo;
6. Kementerian PAN & RB;
7. Kejaksaan Agung;
8. Badan Intelijen Negara

9. Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepolisian Negara RI;
11. Instansi lain yang dianggap perlu.

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor : 1 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko Polhukam, struktur Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh 5 (lima) orang Pejabat Eselon II yang terdiri dari:
   a. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;
   b. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
   c. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN;
   d. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional;
   e. Sekretaris Deputi
2. Asisten Deputi dibantu oleh Kepala Bidang Kerjasama Politik dan Pertahanan ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Hukum, Keamanan dan HAM ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik, Kepala Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah, Kepala Bidang Kerjasama Amerika, Kepala Bidang Kerjasama Eropa, Kepala Bidang Kerjasama Politik, Keamanan dan Pertahanan Internasional, Kepala Bidang Kerjasama Hukum, HAM dan Kemanuasiaan Internasional serta para analis kebijakan.
3. Sekretariat atau Tata Usaha, terdiri dari Sekretaris Deputi setingkat Eselon II dibantu oleh Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Kepala Sub

Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum, Analis Tata Usaha, Pengadministrasi Umum dan Staf Tata Usaha.

Gambar 1 :

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDKOOR POLLUGRI

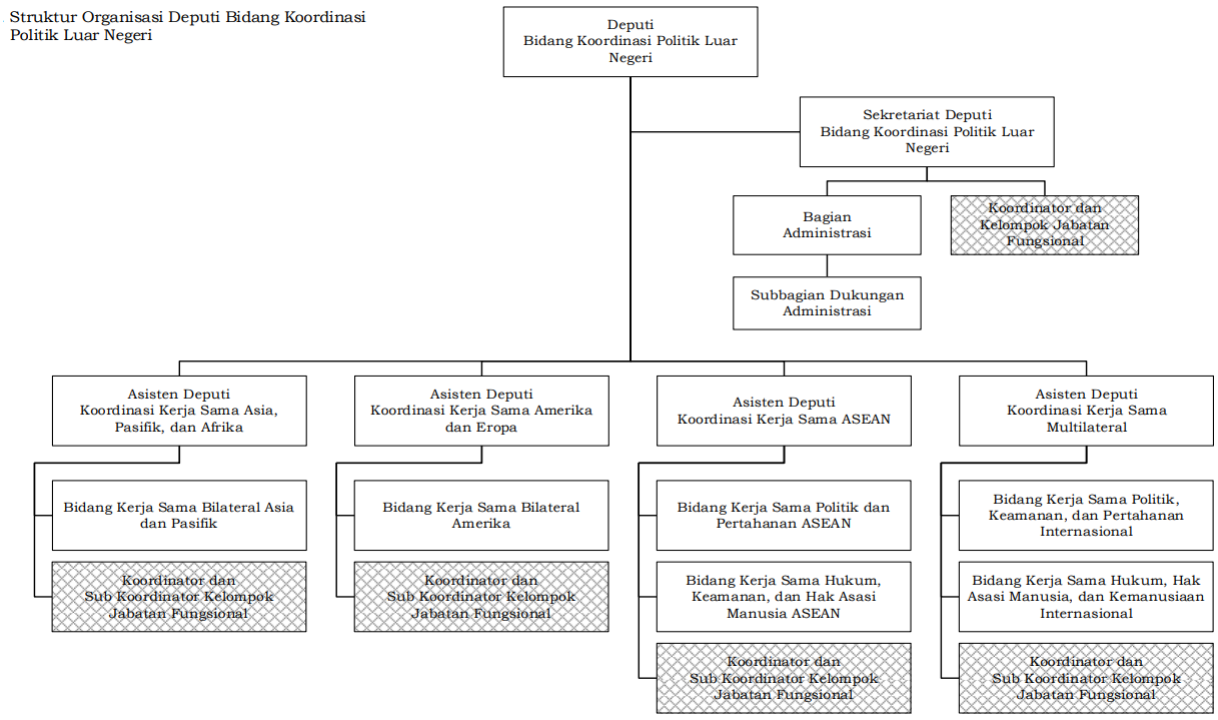

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik Luar Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar negeri; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oIeh Menteri Koordinator.

PERMASALAHAN UTAMA

Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di kawasan. Amerika Serikat (AS) merespons Tiongkok dengan menggelar kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakan pembentukan Code of Conduct (CoC) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pada prosesnya menemui hambatan.

Mudahnya pergerakan aktor non negara secara trans-nasional membuat dinamika ancaman non tradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia. Isu permasalahan utama yang mendapat perhatian besar adalah: (1) Terorisme; (2) Perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia; (3) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkotika ke Indonesia; (4) *illegal, unreported and unregulated* (IUU) *fishing* yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) Keamanan siber.

Sementara itu, isu lain yang perlu menjadi perhatian Indonesia adalah melemahnya multilateralisme dan populisme. Kedua isu ini berdampak pada pelemahan tata kelola global, yang mendorong negara-negara cenderung mengeluarkan kebijakan unilateral.

Prioritas kebijakan bidang kerjasama pembangunan internasional saat ini adalah mendukung kerja sama pembangunan internasional dalam peningkatan perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, beberapa isu yang dihadapi antara lain:

- Penguatan pelaksanaan Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung peningkatan perdagangan dan investasi melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian.
- Dari sisi kelembagaan, diperlukan pembentukan mekanisme dan pengelolaan pendanaan satu pintu agar kerjasama pembangunan internasional dapat dilaksanakan secara integratif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional
- Dari sisi pendanaan, perlunya pemanfaatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru, misalnya skema kredit ekspor melalui
- Pada Aspek Sosial-budaya, Citra positif Indonesia sangat penting dalam pergaulan Internasional, sehingga Indonesia perlu melakukan diplomasi publik, termasuk kerja sama pembangunan internasional.

Indonesia telah memiliki modal dalam melakukan diplomasi publik, yaitu negara demokrasi, masyarakat pluralistik dan toleran, ekonomi progresif, keanekaragaman budaya, dan diaspora Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan diplomasi publik mengingat ada banyak aktor yang terlibat. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan ditampilkan kepada publik internasional.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi kebijakan luar negeri terdapat target program prioritas, yaitu memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri.

Indonesia telah menjadi anggota aktif di 233 organisasi/forum internasional, seperti ASEAN, G20, dan PBB. Indonesia perlu memanfaatkan keanggotaannya untuk kepentingan nasional. Inisiatif dan posisi yang disampaikan Indonesia di dalam organisasi/forum internasional dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tatanan internasional.Pada tingkat domestik, perlu penataan peran dan fungsi K/L dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, khususnya peningkatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan K/L terkait agar Indonesia dapat segera menindaklanjuti kesepakatan atau komitmen di tingkat internasional. Selain itu, perlu pengaturan kewenangan Kepala Perwakilan dan pejabat perbantuan di Perwakilan RI sehingga dapat memperjelas hak dan kewajiban pejabat perbantuan di Perwakilan RI.

- **SUMBER DAYA ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA**

1. Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri TA. 2021 sebesar Rp. **7.234.603.000**,-. Anggaran untuk dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2 :
Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	1.777.225.000
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	1.579.455.000
ABC.001	Koordinasi Kerjasama ASEAN	1.718.619.000
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional	1.129.195.000
EAC	Sekretaiat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	1.030.109.000
Total Anggaran Kedeputian Bid. Koord. Politik Luar Negeri 2021		**7.234.603.000**

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh:

1. Sekretariat Deputi;
   - 1.1. Bagian Administrasi
   - 1.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
   - 2.1. Bidang Kerjasama Bilateral Asia dan Pasifik;
   - 2.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
   - 3.1. Bidang Kerjasama Bilateral Amerika
   - 3.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN
   - 4.1. Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN;
   - 4.2. Bidang Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia ASEAN;
   - 4.3. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional
   - 5.1. Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional;
   - 5.2. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional.
   - 5.3. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
   - 6.1. Fungsional Tertentu;
   - 6.2. Fungsional Umum.

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya,penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Deputi Bidkoor Pollugri 2021-2024 mencakup visi, misi, program dan Indikator Kinerja. Rencana strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu S.d. Triwulan II Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidkoor Pollugri menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka **Visi** Deputi Bidkoor Pollugri adalah

Meningkatkan Kapasitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Dalam Rangka Mendukung Tujuan Nasional di bidang Politik Luar Negeri

Guna mewujudkan visi tersebut, Sekretarias Deputi Bidkoor Pollugri menetapkan **Misi** yang diharakan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan yaitu :

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar negeri;
b. Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidkoor Pollugri dalam pembangunan bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2018 adalah

a) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar negeri;
b) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisian di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
c) Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

2. Strategis Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tersebut maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yaitu

Tabel 3:
Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama
Deputi BidKoor Pollugri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	e. Nilai SAKIP
	f. Nilai PMPRB
	g. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
	h. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

B. PERJANJIAN KINERJA

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4:
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
S.d. Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	90%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	90%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	90%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	d. Nilai SAKIP	BB
	e. Nilai PMPRB	18
	f. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4
	g. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	66,67

Tabel 5:
Penjelasan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
S.d. Triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
1) Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	1) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri; K/L Teknis : Kementerian Luar Negeri Target 2021 : 87 2) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional; K/L Teknis : Kementerian Luar Negeri Target 2021 : 3,83 3) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral K/L Teknis : Kementerian Luar Negeri Target 2021 : 11
2) Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	Perhatian besar pada dokumen perencanaan nasional mencakup isu-isu : 1) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI; 2) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional; 3) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral; 4) Terorisme; 5) Transnational Crime;

Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
	6) Perdagangan manusia; 7) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, 8) illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan 9) Keamanan siber.
3) Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidang Koordinator Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
4) Nilai SAKIP	Penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam atas pelaksanaan Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
5) Nilai PMPRB	Penilaian Mandiri Inspektorat Kemenko Polhukam bersama Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri atas pelaksanaan Sistem Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
6) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	Penilaian atas pelayanan Kesekretariatan Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
7) Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	Penilaian Biro Perencanaan dan Organisasi atas pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun 2021 tersebut diimplementasikan melalui program peningkatan koordinasi bidang Pollugri dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi kebijakan dan sasaran meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan bidang Pollugri. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan melalui:

1. Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
2. Koordinasi kerjasama Amerika Eropa
3. Koordinasi kerjasama ASEAN
4. Koordinasi kerjasama Organisasi Internasional
5. Layanan Kesekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Jumlah Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mendukung kegiatan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah sebesar Rp 7.234.603.000,- (*Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja S.d. Triwulan II Tahun 2021

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun 2021 per tanggal 30 Juni 2021 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6:
Pengukuran Capaian Kinerja S.d. Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi S.d. Triwulan II Tahun 2021	% Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	90%	n.a	
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	90%	100%	114%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	90%	66,67%	74%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	d. Nilai SAKIP	BB	n.a	
	e. Nilai PMPRB	18	n.a	
	f. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	n.a	
	g. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75	n.a	

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- **Sasaran Strategis : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif**

1. Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, adapun target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam dibawah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kedeputian Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri, yaitu:

a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri;

b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;

c) Jumlah Forum Internasional

Tabel 7:
Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri Pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional S.d. Triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri	87	n.a	n.a
b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,83	n.a	n.a
c) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral	11	n.a	n.a
Rata – rata Realisasi 2021 =			n.a %
Target Capaian 2021 =			n.a %

Persentase Capaian 2021 =	%

a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri;

Sejak awal 2020, hampir seluruh negara di dunia menghadapi wabah infeksi virus corona baru yang membuat pemerintah masing-masing sibuk berupaya mencegah penularan lebih lanjut demi keselamatan warga negara. Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) sejak awal selalu menjadi salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintah.

Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri, "Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI" diperoleh berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Pengukuran capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI melalui 3 (tiga) indicator, yaitu:

1. Sub IKU-1: Persentase Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri,
2. Sub IKU-2: Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu
3. Sub IKU-3: Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, dan
4. Sub IKU-4: Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Pengukuran Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI dilakukan pada akhir S.d. Triwulan II Tahun 2021. Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribusi kepada pengukuran dan penghitungan Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI S.d. Triwulan II Tahun 2021 namun melalui koordinasi, sinkrosnisasi dan pengendalian berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI S.d. Triwulan II Tahun 2021 S.d. Triwulan II Tahun 2021, hal tersebut dilakukukan melalui Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-3), antara lain:

1. Penanganan pemulangan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina; Menko Polhukam meminta kepada K/L terkait agar pemulangan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina dapat dilakukan secara low profile dan tetap mengedepankan *soft diplomacy* dengan negara Malaysia dan Filipina.

Tabel 8:
Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI Tahun 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021
Target	82,21	83,68	86	87
Realisasi	98,49	89,91	88,35	n.a
Capaian	95,00%	94,50%	102,73%	n.a

Selama 3 tahun terakhir, capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI menunjukkan penurunan. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan pengukuran, yaitu Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu merupakan Sub IKU baru yang belum didukung unit kerja struktural secara formal. Pada S.d. Triwulan II Tahun 2021 terdapat berbagai perubahan akibat pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan perubahan pada berbagai bentuk dan jadwal kegiatan, serta berbagai tantangan pra Covid-19 yang masih ada dan di luar kendali pemerintah.

Salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian target kinerja antara lain adalah Pandemi Covid-19. Pandemi memicu peningkatan masalah dan kasus yang dialami oleh WNI yang berada di luar negeri juga mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan. Berbagai kegiatan pelayanan dan pelindungan WNI harus dibatalkan, dijadwalkan ulang, atau diubah formatnya pada S.d. Triwulan II Tahun 2021. Perubahan ini sangat mempengaruhi hasil dan efektivitas

berbagai kegiatan. Lebih lanjut, tantangan dari tahun-tahun sebelumnya pada masa sebelum pandemi juga masih ada, yaitu:

1) banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian kasus seperti: kebijakan pemerintah setempat, termasuk kebijakan protokol kesehatan (lockdown, terbatasnya jam pelayanan kantor pemerintahan dsb) yang menghambat proses penyelesaian kasus,
2) ketersediaan moda transportasi repatriasi,
3) keberadaan alat bukti, saksi, dan sistem hukum negara asing, dan
4) proses koordinasi di dalam negeri untuk penanganan kasus juga kerap dihadapkan pada kendala keterbatasan kapasitas yang ada pada kementerian/lembaga/instansi dalam tindak lanjut penanganan kasus di dalam negeri.

Pandemi Covid-19 yang masih menjangkiti akan terus mempengaruhi WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri serta cara WNI bepergian ke luar negeri. Kontraksi ekonomi dan sosial akan terus berlangsung paling tidak hingga 1 tahun ke depan. Dapat diprediksikan WNI akan terus mengalami berbagai masalah ketenagakerjaan, keimigrasian maupun masalah lainnya akibat dari kontraksi ekonomi dan sosial tersebut. Apabila kegiatan pelindungan WNI di luar negeri dan upaya menghadapi tantangan penyelesaian kasus dapat terus dilaksanakan, target peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan WNI pada tahun 2021 akan dapat dicapai. Untuk itu, diperlukan strategi penyeimbang selain penanganan kasus yang tepat dan berpihak, yaitu upaya prevensi dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari masalah di luar negeri, penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan pelindungan, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan pelindungan dan penguatan diplomasi pelindungan.

b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;

Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional" bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada

masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*.

Gambar 2. The 7th Indonesia-Australia ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM RI-Australia ke-7)

Pengukuran Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, menggunakan metode Anholt

Interval	Kategori Indeks
0 - 16,67	Sangat Buruk
16,68 - 35,35	Buruk
35,36 - 50,01	Cukup Buruk
50,02 - 66,68	Cukup Baik
66,69 - 83,35	Baik
83,36 - 100	Sangat Baik

Catatan:
Perhitungan kategori indeks menggunakan formula:

Indeks yang dicapai dibagi 5 (indeks tertinggi Anholt) x 100

Jika indeks yang dicapai adalah 3.00 maka:
3.00/5 x 100 = 60

Dengan interval masuk pada rentang **50,02 - 66,68** maka indeks tersebut tergolong **"cukup baik"**

Indikator tersebut diukur dengan menggunakan metode Anholt yang dilakukan dengan penilaian pada 6 (enam) dimensi yaitu:

1. *Governance* yakni mengukur opini publik tentang "Competency dan Fairness" termasuk komitmen suatu negara (Indonesia) terhadap isu-isu global;

2. *Export* yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara (Indonesia);
3. *Tourism*, yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi suatu negara (Indonesia) baik untuk wisata alam maupun menonton atraksi atau program pariwisata;
4. *Investment and Immigration*, yakni mengukur ketertarikan atau minat publik untuk tinggal, berinvestasi, atau belajar di suatu negara (Indonesia), termasuk pandangan mereka tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia;
5. *Culture and Heritage*, yakni mengukur ketertarikan publik pada Budaya Warisan maupun Kontemporer suatu negara (Indonesia);
6. *People*, yakni mengukur pandangan publik tentang reputasi penduduk suatu negara (Indonesia) tentang kompetensi, keterbukaan, keramahtamahan, dan nilai-nilai universal seperti toleransi.

Penghitungan target "Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional" diukur melalui survei yang dilakukan oleh 129 (seratus dua puluh sembilan) Perwakilan RI di luar negeri, tidak termasuk 3 (tiga) Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), dengan menyasar masyarakat asing non-WNI di luar negeri. Masyarakat asing tersebut dapat terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum setempat, pemerintah setempat, parlemen, media, akademisi, LSM, serta *counterpart* terkait lainnya.

Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribusi kepada pengukuran dan penghitungan citra Indonesia di dunia internasional namun melalui koordinasi, sinkrosnisasi dan pengendalian, Kemenko Polhukam berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2021, hal tersebut dilakukukan melalui peningkatan dimensi:

Governance yakni mengukur opini publik tentang "Competency dan Fairness" termasuk komitmen suatu negara (Indonesia) terhadap isu-isu global

Menko Polhukam berpartisipasi secara virtual sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan the 14th United Nation Congress Of Crime Prevention dan Criminal Justice, di Kyoto pada tanggal 7 Maret 2021.

Beberapa pokok intervensi Indonesia antara lain :

1. mengajak negara-negara anggota PBB untuk memperkuat kerja sama Internasional Pencegahan dan penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan lintas negara sebagai upaya pencapaian SGD 2030 khususnya tujuan nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
2. Mengingatkan agar negara-negara PBB memberi perhatian serius atas kejahatan perikanan (IUU Fishing) yang terkait dengan lejahatan lintas negara lainnya;
3. Mengusulkan pembentukan suatu norma dan standar internasional dalam memenuhi tujuan SDG 16 butir 2 mengenai pengakhiran tindak kekerasan terhadap anak, terutama bagi anak

yang terdampak teroris dan kelompok ekstrem, dengan fokus pada upaya pencegahan, rehabilitasi serta tetap menjunjung hak-hak anak.

Komitmen Indonesia terhadap isu-isu global ***Terorisme dan Transnasional Crime***

- Terorisme merupakan isu lintas negara yang membutuhkan komitmen seluruh negara di dunia dalam penangulangan dan pencegahannya. Indonesia sebagai negara yang berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia, salah satunya dengan menekan angka kasus terorisme, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penangulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. Dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komperhensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif kemeneterian, lembaga dan pemerintah daerah. RAN PE mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- Penanganan pemulangan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina; Menko Polhukam meminta kepada K/L terkait agar pemulangan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina dapat dilakukan secara low profile dan tetap mengedepankan *soft diplomacy* dengan negara Malaysia dan Filipina.
- Perumusan Standard Operational Prosedure (SOP) United State Peace Corps (USPC). Dalam rangka memberikan kontribusi positif terhadap hubungan bilateral RI-AS diperlukan SOP USPC. SOP USPC memastikan agar program kerjasama USPC ini tidak disalahgunakan pihak tertentu di AS untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan atau mengancam keamanan

nasional, dan sebaliknya guna memberikan perlindungan bagi para relawan USPC selama bertugas di Indonesia.

- Pungusulan Revisi Perpres 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kemenko Polhukam mengajukan revisi terutama dalam hal memperjelaskan status kedaruratan dan jangka waktu kedaruratan penanganan pengungsi dari luar negeri; penegasan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, hubungan pembagian beban dan tanggung jawab dengan organisasi internasional; dan hal-hal lain yang dapat mempertajam dan membantu semakin baiknya penanganan pengungsi dari luar negeri.

Terdapat penurunan jumlah responden Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional S.d. Triwulan II Tahun 2021 dibanding tahun 2019 demikian juga Jumlah Perwakilan yang berpartisipasi pada S.d. Triwulan II Tahun 2021 juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 9 :
Perbandingan Capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2017 – 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Target	4,00	4,00	4,00	3,66,67	n.a
Realisasi	3,81	3,66,67	3,78	3,82	n.a
Capaian	95,25%	95,00%	94,50%	100,53%	n.a

Tabel 10 :
Perbandingan Jumlah Responden Dan Perwakilan Survei Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Jumlah responden yang terverifikasi (orang)	12.624	12.896	10.277
Jumlah Perwakilan yang berpartisipasi (perwakilan)	104	121	110

Secara umum, dalam meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

a. Belum adanya *grand design* terkait penguatan citra Indonesia dalam hal politik, hukum dan keamanan di luar negeri, seperti image seperti apa yang akan ditampilkan Indonesia dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
b. Koordinasi antar K/L masih belum terlalu kuat dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
c. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta kondisi negara yang berbeda-beda dalam hal mewujudkan program dan strategi untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional;
d. Masih belum maksimalnya pemanfaatan media massa asing dan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri;
e. Khusus S.d. Triwulan II Tahun 2021, adanya pandemic Covid-19 membuat beberapa penyelenggaran kegiatan Kemenko Polhukam yang bersifat internasional yang telah direncanakan harus dibatalkan.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Adanya penyusunan *grand design* terkait penguatan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
b. Meningkatkan koordinasi antar K/L dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dengan situasi Pandemi yang membatasi pertemuan, dan juga

inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan agar pertemuan tetap berjalan antara lain dengan melakukan pertemuan virtual.

e) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral

Kepemimpinan pada forum regional dan multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan, serta Indonesia/WNI dapat menduduki suati jabatan strategis pada Organisasi Internasional dimana Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk ikut serta menyusun kebijakan Organisasi Internasional, menyusun dan melaksanakan program-program kerja Organisasi Internasional yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Penghitungan capaian Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral meliputi peran Indonesia dalam memimpin atau mengarahkan pada forum regional dan multilateral, misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, member of bereau, dan keberhasilan pencalolnan Indonesia pada Organisasi Internasional.

Menko Polhukam berpartisipasi secara virtual sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan the 14th United Nation Congress Of Crime Prevention dan Criminal Justice, di Kyoto pada tanggal 7 Maret 2021.

Beberapa pokok intervensi Indonesia antara lain :

1. Menga jak negara-negara anggota PBB untuk memperkuat kerja sama Internasional Pencegahan dan penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan lintas negara sebagai upaya pencapaian SGD 2030 khususnya tujuan nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
2. Mengingatkan agar negara-negara PBB memberi perhatian serius atas kejahatan perikanan (IUU Fishing) yang terkait dengan lejahatan lintas negara lainnya;
3. Mengusulkan pembentukan suatu norma dan standar internasional dalam memenuhi tujuan SDG 16 butir 2 mengenai pengakhiran tindak kekerasan terhadap anak, terutama bagi anak yang terdampak teroris dan kelompok ekstrem, dengan fokus pada upaya pencegahan, rehabilitasi serta tetap menjunjung hak-hak anak.

a. Indikator Kinerja 2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional.

$$= \frac{\text{Rekomedasi Kedeputian Pollugri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional}}{\text{Jumlah Rekomedasi Kedeputian Pollugri}}$$

$$= \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{3}}$$

Capaian = 100%

Tabel 12 :
Rekapitulasi Rekomendasi Kedeputian Pollugri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional

Asisten Deputi	Jumlah Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
1. Bidkor Kerma Aspasaf	1 Rekomendasi
2. Bidkor Kerma Amerop	1 Rekomendasi
3. Bidkor Kerma ASEAN	0 Rekomendasi
4. Bidkor Kerma Organisasi Internasional	1 Rekomendasi
Jumlah =	**3 Rekomendasi**

1. Rekomendasi terkait Penanganan WNI terkait Kasus Terorisme di Malaysia dan Filipina (vide Surat Plt. Deputi Bidkoor Pollugri nomor R-36/LN.00.00/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 kepada Kementerian/Lembaga terkait). Rekomendasi penanganan WNI terkait kasus terorisme di Filipina dan Malaysia mendukung dokumen perencanaan nasional pada indikator pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Rekomendasi ini memuat prinsip operasi dan langkah teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam menangani WNI yang terkait kasus terorisme di Malaysia dan Filipina. Sebagai catatan, penanganan WNI terkait kasus terorisme di luar negeri

dilakukan dengan dasar case by case mengingat sensitivitas isu dan perbedaan sistem penanganan warga negara asing di setiap negara.

2. Surat Rekomendasi Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri kepada K/L terkait mengenai Hasil Rapat Koordinasi Finalisasi Standard Operation Procedure (SOP) Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan terhadap Program U.S. Peace Crops (USPC) di Indonesia. Perumusan Standard Operational Prosedure (SOP) United State Peace Corps (USPC). Dalam rangka memberikan kontribusi positif terhadap hubungan bilateral RI-AS diperlukan SOP USPC. SOP USPC memastikan agar program kerjasama USPC ini tidak disalahgunakan pihak tertentu di AS untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan atau mengancam keamanan nasional, dan sebaliknya guna memberikan perlindungan bagi para relawan USPC selama bertugas di Indonesia.
3. Surat Menko Polhukam kepada Menteri Luar Negeri Nomor 31/LN.00.03/3/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Perihal Rekomendasi Tentang Usulan Revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Rekomendasi yang telah dikeluarkan tersebut mendukung dokumen perancanaan nasional, terutama dalam rangka mendukung Citra Indonesia di Dunia Internasional. Rekomendasi yang disampaikan kepada Menlu tersebut diarahkan untuk mempertajam dan memperbaiki tata kelola (governance) dalam penanganan pengungsi dari luar negeri

b. Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti

$$= \frac{\text{Rekomedasi Kedeputian Pollugri yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomedasi Kedeputian Pollugri}}$$

$$= \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$$

Capaian = 66,67%

Tabel 13 :
Rekapitulasi Rekomendasi Kedeputian Pollugri yang ditindaklanjuti

Asisten Deputi	Jumlah Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
1. Bidkor Kerma Aspasaf	1 Rekomendasi
2. Bidkor Kerma Amerop	1 Rekomendasi
3. Bidkor Kerma ASEAN	0 Rekomendasi
4. Bidkor Kerma Organisasi Internasional	0 Rekomendasi
Jumlah =	**2 Rekomendasi**

1. Rekomendasi penanganan WNI terkait kasus terorisme di Filipina dan Malaysia yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu bersama dengan Otoritas Bandara Soekarno Hatta bersama Kementerian/Lembaga terkait lainnya melalui rapat koordinasi tanggal 5 Maret 2021 (vide Surat Undangan Dit. PWNI & BHI Kemlu nomor 03843/WN/03/2021/66/10 tanggal 4 Maret 2021. Rapat tersebut membahas tindak lanjut teknis terhadap rekomendasi Kemenko Polhukam terkait proses penanganan WNI terkait kasus terorisme di Malaysia.
2. Surat Tanggapan atas Naskah SOP Monev Bidang Keamanan terhadap Program U.S. Peace Corps (USPC) di Indonesia dari Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-31/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.01.00/03/2021 tertanggal 9 Maret 2021. Melalui surat tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menindaklanjuti surat yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Kemenko Polhukam dengan memberikan masukan tertulis terhadap draft SOP tersebut, yaitu khususnya pada butir 7 dan 8 pada Dasar Hukum dengan menyebutkan dokumen Pengaturan Pelaksana terbaru serta butir 2 pada Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga Terkait.

- **Sasaran Strategis : Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal**

1. Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Capaian Kinerja

Tabel 14:
UNSUR-UNSUR PENILAIAN SAKIP

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Pada S.d. Triwulan II pengukuran Evaluasi SAKIP Unit Kerja belum dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Adapun upaya yang dilakukan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai Evaluasi SAKIP Unit Kerja Tahun 2021, yaitu diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja:
   - Telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Eselon I s.d. staf;
   - Telah disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021;
   - Mereview Renstra Deputi Bidkoor Pollugri tahun 2020-2024

2. Pengukuran Kinerja:
   - Telah disusun dokumen manual indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2021
   - Telah dilakukan penyusunan dokumen manual indikator kinerja utama Tahun 2021.

3. Pelaporan Kinerja:
   - Pelaporan Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d Eselon IV pada Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri periode Tahunan 2020 (nodin lakip Dep ke menko)
   - Pelaporan Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d Eselon IV pada Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri periode S.d. Triwulan II Tahun 2021
   - Pelaporan kinerja eselon I s.d. II ke esr.menpan.go.id
   - Pelaporan Kinerja Pegawai Tahun 2020 dalam aplikasi sistem kinerja pegawai SKP dalam simpeg.polkam.go.id

4. Evaluasi Kinerja:
   - Telah dilakukan evaluasi kinerja secara rutin dalam rapat internal staf Deputi Bidkoor Polugri

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan bagian evaluasi Kemenko Polhukam secara rutin setiap 3 bulan sekali (per triwulan).
- Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dari seluruh indikator yang telah ditetapkan tahun 2020 mencapai persentase realisasi target rata-rata yang lebih dari 100%.

Tabel 15
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2017 s.d. 2020

No	Komponen	2017	2018	2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	20,50	21,88	24,25	25,89
b.	Pengukuran Kinerja	19,10	20,10	20,10	18,13
c.	Pelaporan Kinerja	10,63	10,63	10,63	9,66,67
d.	Evaluasi Internal	6,69	6,69	6,69	7,88
e.	Pencapain Sasaran/Kinerja Organisasi	16,21	16,21	13,09	15,44
	Total Nilai =	**73,13**	**75,51**	**76,08**	**77,12**
	Kategori =	**B**	**B**	**BB**	**BB**

2. Indikator Kinerja 2 : Nilai PMPRB

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penguatan Pengawasan
6. Penatan Sistem Manajemen SDM
7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sumber data Penilaian dalam PMPRB adalah Laporan Hasil Evaluasi PMPRB Unit Kerja Eselon I oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Pada S.d. Triwulan II pengukuran Penilaian dalam PMPRB Unit Kerja Eselon I belum dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Adapun upaya yang dilakukan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai Penilaian dalam PMPRB Tahun 2021:

1. Manajemen Perubahan
   - Telah menyusun draft pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri,
   - Telah disusun Draft Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2021,
2. Penataan dan Penguatan Organisasi
   - Melakasanakan kebijakan eselonisasi atau peralihan pejabat eselon III dan IV menjadi fungsional
3. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
   - Koordinasi terkait revisi Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
4. Penataan Sumber Daya Manusia
   - Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021
   - Pelaksanaan Diklat dalam rangka pengembangan SDM
   - diklat manajemen keuangan negara melalu nodin xxx
   - Penerapan aturan disiplin bagi pegawai Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
   - Pemberlakuan jadwal WFO dan WFH bagi pegawai Kedeputian Polugri
5. Penataan Tata Laksana

- Telah dilaksanakannya review SOP Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
- Tersusunnya konsep SOP baru mengenai pendataan dan pemeliharaan Barang Milik Negara

6. Penguatan Pengawasan
   - Pelaporan LHKPN 100%
   - LHKASN sampai dengan s.d. Triwulan II masih pada tahap pengumpulan data
7. Penguatan Akuntabilitas Kerja
   - Menyusun Perjanjian Kinerja Eselon I s.d. staf periode tahun 2021
   - Menyusun IKU 2020-2024
   - Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2021
   - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   - Melakukan penyebaran kuisoner pada rapat koordinasi antar K/L terkait layanan yang telah diberikan;
   - Kedeputian II/Polugri terdapat : SOP Pelayanan, Maklumat Pelayanan. Informasi pelayanan dapat diakses melalui website Kemenko Polhukam, dan media sosial pollugri (instagram) yang terus di update dapat dilakukan melalui tatap muka/audiensi, serta dilakukan review internal terhadap pelayanan kedeputian;
   - Pelayanan Pengaduan masyarakat/permohonan audiensi dan ditindaklanjuti melalui surat.

Tabel 16
Rincian Penilaian PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2020

No	Penilaian	Bobot	Nilai
PENGUNGKIT		**36,30**	**28,64**
I	**Pemenuhan**	**14,60**	**12,27**
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,22
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,75
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,67
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,94
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,38
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,93
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	2,50	1,89
II.	**Reform**	**21,70**	**16,37**
1.	Manajemen Perubahan	3,00	1,00
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,50
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	2,75
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,75
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,58
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	3,75	3,34

Indikator Kinerja 3 : Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalamnilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan sepanjang S.d. Triwulan II Tahun 2021. Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terdiri atas:

a. Aspek Internal;

Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dari unsur-unsur :

- Layanan Kepegawaian;
- Layanan Persuratan;
- Layanan Kearsipan;
- Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- Layanan Umum.

b. Aspek Eksternal.

Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri maupun diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri .

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri selama S.d. Triwulan II Tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Membuat identifikasi variable Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretaris Kedeputian Bidkoor Pollugri, menetapkan responden, tempat dan waktu pelaksanaan pengisian survei dan pengumpulan data untuk bahan Survei;
b) Pengelolaan arsip (Surat keluar dan surat masuk) di Deputi Bidkoor Pollugri;

c) Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar;

d) Pengisian Rencana dan realisasi Sasaran Kinerja Pegawai hardcopy dan pengisisan pada http://simpeg.polkam.go.id;

e) Membuat validasi data pegawai di lingkungan Deputi Bidkoor Pollugri, Data Inventaris Ruangan dan mengikuti kegiatan Bimtek SAKIP dan PMPRB Unit Kerja.

f) Penyebaran kuisioner setiap rapat,

g) Menerima audiensi dari para stake holder Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

h) Pemenuhan sarana dan prasarana ruang kerja

Tabel 17
Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2019 s.d. 2021.

Komponen	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	4	4	4	4	4	n/a

Indikator Kinerja 5 : Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Pada S.d. Triwulan II pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggran belum dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam. Adapun upaya yang dilakukan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggran Tahun 2021, yaitu diantaranya:

a. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Es I-Es IV Kedeputian Bidkoor Poldagri;

b. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021 Kedeputian Bidkoor Poldagri;

c. Menyusun Dokumen IKU Deputi Bidkoor Poldagri Tahun 2021;

d. Menyusun Laporan Kinerja Deputi Bidkoor Poldagri Tahun 2020;

e. Melaksanakan Monev s.d. Triwulan II tahun 2021

Tabel 18
Komponen Nilai Indeks Kualitas Perencanaan S.d. Triwulan II Tahun 2021

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Ketepatan Waktu Dokumen Perencanaan	7,50	
2.	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	
3.	Jumlah Revisi	10,00	
4.	Keselarasan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Perencanaan Nasional	20,00	
5.	Respon Perencana Unit Organisasi	5,00	
6.	Ketepatan Waktu Dokumen Monev	12,50	
7.	Kualitas Laporan Kinerja	12,50	
8.	Kesesuaian Laporan Kinerja dengan Dokumen Perencanaan	12,50	
9.	Respon Bagian Monev Unit Organisasi	12,50	
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**n/a**

C. Efisiensi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh 33 orang, yaitu :

- 1 orang Eselon I sebagai Deputi
- 4 orang Esellon II sebagai Asisten Deputi
- 1 orang Esellon II sebagai Sekretaris Deputi
- 8 orang Esellon III sebagai Kepala Bidang
- 2 orang Esellon III sebagai Kepala Bagian
- 4 orang Esellon IV sebagai Kepala Sub Bagian
- 6 orang analis bidang Politik Luar Negeri dan
- 7 orang tenaga administrasi bidang Politik Luar Negeri.

Jumlah sumber daya manusia tersebut belum mencapai kondisi ideal, dimana unit kerja eselon II hanya memiliki 1 atau 2 orang analis. Demikian pada unit kerja Sekretaris Deputi masih terdapat posisi jabatan yang kosong, yaitu perencana dan pengevaluasi program dan kinerja.

Namun dengan keterbatasan sumber daya tersebut Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berusaha mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh sumber daya manusia yang ada agar tetap mampu memenuhi target kinerja dan target saasaran strategis S.d. Triwulan II Tahun 2021.

Pagu awal DIPA Deputi Bidkoor Pollugri Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 10.828.555.000. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, maka dalam upaya penanggulangan bencana tersebut Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah realokasi anggaran dengan menerbitkan Peraturan Presiden nomor 54 S.d. Triwulan II Tahun 2021 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2021 tentang rincian penyesuaian postur anggaran Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2021. Kemenko Polhukam mendapatkan perubahan (pemotongan) anggaran sebesar dari semula Rp 282.769.824.000 menjadi Rp 268.970.603.000.

Berdasarkan nota dinas Sesmenko nomor 00527/KU/04/2021/03 perihal realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19, anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mengalami realokasi sebesar Rp 1.050.000, sehingga pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menjadi Rp 7.234.603.000.

Tabel 19
Perubahan Pagu Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri
Periode S.d. Triwulan II Tahun 2021

Kode	Uraian Output	Awal (Rp)	Revisi B-10/PR.01/1/2021 (Rp)
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.548.358.000	1.777.225.000
ABC.002	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	2.264.776.000	1.579.455.000

ABC.003	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.464.323.000	1.718.619.000
ABC.004	Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional	1.619.149.000	1.129.195.000
EAC.001	Layanan Perencanaan dan Evaluasi - Sekretaiat Deputi Bidkoor Pollugri	845.744.000	589.822.000
EAC.001	Layanan Tata Usaha dan Umum-Sekretaiat Deputi Bidkoor Pollugri	631.326.000	440.287.000
Total Pagu Anggaran =		**10.373.676.000**	**7.234.603.000**

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran revisi kegiatan Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7.234.603.000,- (*Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah)*.Juga Ebam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), Tahun anggaran 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 telah diserap sebesar Rp 3.367.484.001,- (*Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Satu Rupiah)*. Secara kualitas dana yang terserap untuk mendukung kegiatan tersebut sebesar 46,55% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 20
Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri
S.d. Triwulan II Tahun 2021 Berdasarkan Eselon II atau Rincian Output

Kode	Uraian	Jumlah	Realisasi	%
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	1.777.225.000	981.451.928	55,22%
ABC.002	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	1.579.455.000	569.174.695	36,04%
ABC.003	Koordinasi Kerjasama ASEAN	1.718.619.000	716.497.105	41,69%
ABC.004	Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional	1.129.195.000	607.128.244	53,77%
EAC	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	1.030.109.000	493.232.029	47,88%
	Total =	**7.234.603.000**	**3.367.484.001**	**46,55%**

Dalam mencapai sasaran strategis kinerja S.d. Triwulan II Tahun 2021, Kedeputian Bidkoor Pollugri didukung anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21
Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri S.d. Triwulan II Tahun 2021
Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	PAGU	REALISASI TA 2021 S.d. Triwulan II	% Realisasi
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	6.204.494.000	2.874.251.972	46,33%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1.030.109.000	493.232.029	47,88%
TOTAL KEDEPUTIAN II 2021	**7.234.603.000**	**3.367.484.001**	**46,55%**

Pagu awal DIPA Deputi Bidkoor Pollugri Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 10.828.555.000. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, maka dalam upaya penanggulangan bencana tersebut Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah realokasi anggaran dengan menerbitkan Peraturan Presiden nomor 54 S.d. Triwulan II Tahun 2021 dan surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Kemenko Polhukam mendapatkan perubahan (pemotongan) anggaran sebesar dari semula Rp 282.769.824.000 menjadi Rp 264.405.500.000. Berdasarkan Nota Dinas Semenko Polhukam Nomor B-10/PR.01/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Anggaran TA 2021, adapun anggran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mendapatkan perubahan (pemotongan) anggaran sebesar dari semula Rp 10.373.676.000 menjadi Rp 7.234.603.000.

Berikut perubahan pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri setelah realokasi anggaran S.d. Triwulan II Tahun 2021:

Tabel 22
Perubahan Pagu Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri
S.d. Triwulan II Tahun 2021

Kode	Uraian Output	Awal (Rp)	Revisi B-10/PR.01/1/2021 (Rp)
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.548.358.000	1.777.225.000
ABC.002	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	2.264.776.000	1.579.455.000
ABC.003	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.464.323.000	1.718.619.000
ABC.004	Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional	1.619.149.000	1.129.195.000
EAC.001	Layanan Perencanaan dan Evaluasi - Sekretaiat Deputi Bidkoor Pollugri	845.744.000	589.822.000
EAC.001	Layanan Tata Usaha dan Umum-Sekretaiat Deputi Bidkoor Pollugri	631.326.000	440.287.000
Total Pagu Anggaran =		**10.373.676.000**	**7.234.603.000**

Berikut Perbandingan Data Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2016 s.d. 2021:

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021 Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2017 s.d. S.d. Triwulan II Tahun 2021

	2017	2018	2019	2020	Tw 1 TA 2021
Pagu	6.114.058.000	6.267.327.000	11.850.000.000	8.523.676.00	7.234.603.00
Realisasi	6.091.204.322	6.198.539.473	10.303.009.696	8.188.403.211	1.517.531.230
% Realisasi	99,63%	98,90%	87,95%	96,07%	20,98%

	2017	2018	2019	2020	Tw1 2021
Pagu	6.114.058.000	6.267.327.000	11.850.000.00	8.523.676.000	7.234.603.000
Realisasi	6.091.204.322	6.198.539.473	10.303.009.69	8.188.403.211	1.517.531.230

BAB IV
PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun anggaran 2021 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun Anggaran 2021.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun anggaran 2021 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sekiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri S.d. Triwulan II Tahun anggaran 2021 yang disusun ini dapat dijadikan sebagai umpan balik guna peningkatan kinerja pada triwulan maupun tahun yang akan datang.